BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode satu tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan tahapan yakni penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja/pelaksanaan rencana. Ke empat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh dan dilaksanakan secara transparan dan berkesinambungan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Kesbangpol Provinsi Banten mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan

program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Banten tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

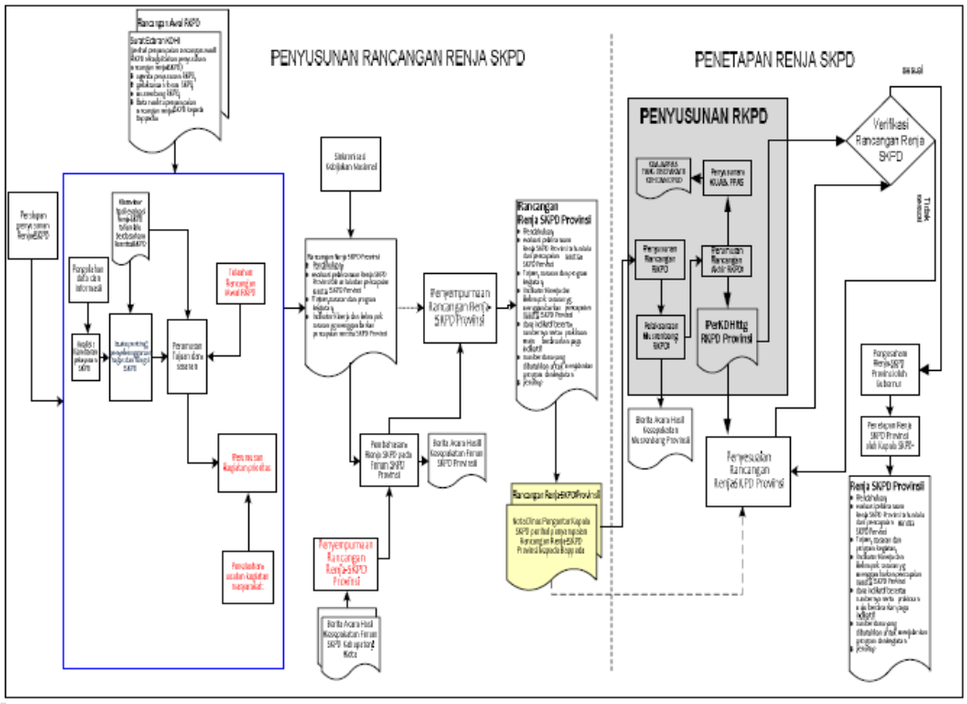

Sejalan dengan tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2024 yaitu "Pembangunan non Infrastruktur untuk membangun secara mental pola fikir manusia dalam membantu percepatan pertumbuhan ekonomi menuju sejahtera" dan kebijakan strategis Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, meningkatkan peran serta masyarakat madani *(civil society),* meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik dan mengembangkan kelembagaan demokrasi lokal.

Untuk dapat mewujudkan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2024 serta melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Banten akan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana

Pembanguan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang akan dicantumkan dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Kesbangpol Provinsi Banten dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyususnan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022;
16. Peraturan Gubernur Banten No. 56 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun yang lalu 2023 dan tahun berjalan 2024, dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Provinsi Banten tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Banten Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Resntra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahsan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU,

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD,

Bab Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja OPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis kinerja pelayanan OPD,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

Berisikan uraian mengenai :

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan;
4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III TUJUAN,

SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

3.3 Program dan Kegiatan (sebagaimana format terlampir)

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan

program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP,

Berisikan Uraian penutup, berupa :

a Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;

b Kaidah-kaidah pelaksanaan;

c Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Secara bahasa evaluasi berasal dari bahasa Inggris “evaluation” yang berarti penaksiran atau penilaian. Lalu secara harfiah evaluasi berarti proses penentuan nilai suatu hal atau objek berdasarkan referensi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan evaluasi yaitu : (1) Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. (2) Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis/penelitan dan kemungkinan memberikan remedia teaching/perbaikan kegiatan.

Selanjutnya, Rencana Kinerja atau Renja rencana kerja tahunan, merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perencanaan kinerja secara jelas mendefinisikan tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang realistis yang konsisten dengan misi tersebut dalam kerangka waktu yang ditentukan dalam kapasitas organisasi untuk implementasi.

Selanjutnya, Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN. Sehingga perlu adanya evaluasi penggunaan program kerja yang menggunakan anggaran baik APBD maupun APBN tentang keberhasilan dan kurang optimalnya dalam menyelenggarakan suatu program kegiatan yang telah di rencanakan pada awal usulan program dan kegiatan tahun sebelumnya, agar usulan tahun berikutnya lebih optimal dan efektif dalam melakukan suatu program melalui baik kegiatan fisik maupun non fisik demi tercapainya suatu pembangunan.

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		OUTCOME
1.	2.	3.		4.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
		-	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus DasarKebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	MENINGKATNYA PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-	Nilai IDI Pada poin hak-hak politik	MENINGKATNYA PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil	MENINGKATNYA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah	MENINGKATNYA KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik.

Kinerja satuan organisasi/kerja banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai perolehan kinerja atas pelayanan yang dilakukan. Nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan. Di samping itu, selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari satuan organisasi/kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk mencapai kualitas efektifitas.

Menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai mencapai tujuan tersebut. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Berikut

dibawah ini adalah Capaian Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 :

Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Kriteria Kinerja	Faktor Pendukung/Penghambat/Permasalahan
Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)							
Badan Ksatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan stabilitas Daerah yang Kondusif untuk Mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	77,91	76,81	100%	Sangat Tinggi	Karena didukung secara optimal oleh Tim Pokja IDI Banten serta Sekretariat IDI Banten pada Badan Kesbangpol Provinsi Banten
		Penanganan Konflik Masyarakat	100	100	100%	Sangat Tinggi	Karena didukung secara optimal oleh Tim Terpadu Banten dan Forkopimda Provinsi Banten bersama unsur masyarakat Banten

b.1 Evaluasi Program Tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Banten. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah, berikut di dawah ini :

1.	**Program**	**:**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**
	Kegiatan	:	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Anggaran	:	Rp 19,331,754,887
	Realisasi	:	Rp 16,609,815,725
	Prosentase realisasi	:	85,92%

2.	**Program**	**:**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Anggaran	:	Rp 5,650,134,835
	Realisasi	:	Rp 5,141,475,965
	Prosentase realisasi	:	91,00%
3.	**Program**	**:**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
	Anggaran	:	Rp 288,333,270,000
	Realisasi	:	Rp 287,717,904,332
	Prosentase realisasi	:	99,79 %
4	**Program**	**:**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Anggaran	:	Rp 1,239,607,428
	Realisasi	:	Rp 1,093,069,615
	Prosentase realisasi	:	88,18%
5.	**Program**	**:**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Anggaran	:	Rp 2,852,052,300
	Realisasi	:	Rp 2,756,594,385
	Prosentase realisasi	:	96,65%
6.	**Program**	**:**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**
	Kegiatan	:	- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
	Anggaran	:	Rp 36,390,257,320
	Realisasi	:	Rp 35,800,610,312
	Prosentase realisasi	:	98,38 %

Anggaran Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebesar Rp. 353,797,076,770 (termasuk perubahan) dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 349,119,470,334 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,68 %. Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023 diperoleh hasil capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Banten sebesar 98,68 %. Dengan capaian kinerja sebesar 98,68 %. Tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil/Sangat memuaskan dalam pencapaian kinerjanya.

b.2 . Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2024 dengan usulan sebesar **Rp. 472.432.707.399** (sebelum perubahan) terurai dalam 6 program, 12 kegiatan dan 64 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten sebagai berikut:

1) Keterbatasan data dan informasi;
2) Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia;
3) Belum optimalnya koordinasi;
4) Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
5) Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

a Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses

partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam membantu Gubernur Banten, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas pelayanan di Provinsi Banten mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perlu di tata dan dikelola scara terstruktur, rapi agar mendapatkan data yang akurat untuk pengelolaan kegiatan pembangunan selanjutnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1 Pengaturan dan Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2 Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3 Belum tertata rapih dan terabaikan prosedur standar operasional yang sudah dibuat untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal diantaranya harmonisasi kebijakan (Masih ada kebijakan yang belum disesuaikan/diperbarui/direvisi sesuai dengan kondisi saat ini), ketersediaan data (data sektoral

pembangunan belum lengkap tersedia, koordinasi dengan SKPD lain perludi tingkatkan terkait data), Kurangnya Jumlah dan kemampuan SDM. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

a Isu Strategis

- ✓ Meningkatkan Kualitas Peencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
- ✓ Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
- ✓ Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten masuk ke dalam klasifikasi Urusan Pemerintahan Umum sehingga berimplikasi pada bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dalam masa transisi/peralihan tidak merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 83 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 tahun 2013, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten.

disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mempunyai tugas pokok : "Membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan ekonomi serta fasilitasi pembinaan politik". dan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kewaspadaan Nasional;
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi;

5. Perumusan kebijakan teknis dibidang Fasilitasi Pembinaan Politik;
6. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
7. Pelaksanaan laporan sesuai tugas dan fungsinya.

b **Strategi Badan Kesbangpol Provimsi Banten**

1) Meningkatkan Kualitas Peencanaan Pengukuran Pelaporan dan evaluasi serta pencapaian kinerja pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten;
2) Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas Daerah;
3) Meningkatkan Kualitas Demokrasi untuk Keamanan dan Stabilitas Daerah.

c Arah Kebijakan Badan Kesbangpol Provinsi Banten

1) Peningkatan kualitas hubungan lintas fungsi yang mendukung capaian kinerja;
2) Peningkatakan kualitas pembinaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM;
3) Peningkatan Kualitas Pemahaman masyarakat terhadap penegakan demokrasi.

d Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten

1) Capaian SAKIP (Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah;
2) Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani;
3) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten.

e Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program.

Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
   1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Kegiatan Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

3. Kegiatan Pada Program Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

4. Kegiatan Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5. Kegiatan Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

6. Kegiatan Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2022 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD.

Selanjutnya tabel dibawah ini merujuk pada tabel Renstra 2023-2026 dikarenakan menunjukan dalam tabel tersebut terdapat program dan kegiatan tahun 2023, Sebab pembangunan dirumuskan secara berkelanjutan dan progresif. Adapun jabatan Gubernur lama hasil Pemilukada 2017-2022 berakhir pada bulan Mei 2022, selanjutnya dalam Renstra 2023-2026 ada beberapa perubahan data-data penambahan nomenklatur kegiatan tahun 2024.

Secara umum dalam evaluasi ini bahwa pelaksanaan rencana kerja OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun lalu melalui evaluasi secara diagnosa harus di padukan dengan Rencana Stratgis/Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dibuat terlebih dahulu sebagai pedoman untuk membuat Renja/Rencana Kerja tahunan termasuk Renja tahun 2024 ini, secara evaluasi apakah sudah sesuai dengan Renstra atau masih harus ada perbaikan dalam melaksanakan kegiatan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023 s/d Tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD 2023 s/d Tahun 2026
Provinsi Banten

Nama SKPD: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
							Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1				2	3	4	5	6=5/4
				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
				Kesatuan Bangsa Dan Politik				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaiannya dari seluruh kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%	100%

					Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	70-80	70-80	100
					Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	77,91	77,91	77,91
					Persentase Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan HAM yang ditangani	100	100	100
1.1				**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.2				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	39 Orang/ Bulan	100%
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokume	12 Dokume	100%
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokume	12 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	100%

					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.3				**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			100%
1.4				**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	100%
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	
					Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25 Orang	25 Orang	100%
					Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	25 Orang	100%
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	25 Orang	25 Orang	100%
1.5				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	100%
					Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	1 Paket	100%
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%

					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.6				**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%
1.7				**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39 Unit	39 Unit	100%
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
1.8				**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Realisasi Capaian Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Peresentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	9 Dokumen	9 Dokumen	100%

					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Orang/Lembaga	Orang/Lembaga	100%
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 Orang	150 Orang	100%
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 Laporan	3 Laporan	100%
					Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	Nilai IDI pada point hak-hak politik	100%	100%	100%

				SERTA BUDAYA POLITIK				
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	12	12	100%

					Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang/Lembaga	Orang/Lembaga	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	150 Orang	100%
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan	100%	100%	100%

				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Organisasi Kemasyarakatan			
					Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang	100%
					Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang	100%
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	6 Laporan	100%

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Fasilitasi Penanganan Konflik Berbasis Ekonomi Sosial, dan Budaya	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang/Lembaga	Orang/Lembaga	100%

					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	150 Orang	100%
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang terjadi di wilayah	100%	100%	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%
					Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	3 Dokumen	3 Dokumen	100%

					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 Orang/Le	8 Orang/Le	100%
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang	150 Orang	100%

					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100%
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.4 Kinerja Pelayanan OPD

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol Provinsi Banten adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesbangpol Provinsi Banten

No	Indikator	SPM	IKK	Realisasi Capaian	Target Capaian	Catatan
				Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n-1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Nilai IKM (Satuan : Skala)	-	Realisasi Belanja per Total APBD x 100%	2,8	-	
	~~Angka Partisipasi Pilpres~~	-		0	-	
	~~Angka Partisipasi Pileg~~	-		0	-	
	~~Angka Partisipasi Pilgub~~	-		0	-	
	~~Angka Partisipasi Pilkada~~	-		65	67	
	Persentase Ormas yang mendapatkan pembinaan (Satuan : %)	-		75	75	
	Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (Satuan : Kegiatan)	-		74	78	
	Persentase penurunan	-		100	100	

	jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan : %)					

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3
Identifikasi Kebijakan Nasional
Provinsi Banten

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Kesatuan Bangsa dan Politik	RENSTRA Kementerian Dalam Negeri 2023-2026	

Badan Kesbangpol Provinsi Banten akan melaksanakan telaahan kebijakan nasional yang tertuang yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembanguan Daerah (RPD) Provinsi Banten Tahun 2023-2026 yang direncanakan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

1. Mewujudkan Hubungan Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat;
4. Meningkatkan Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat;
5. Mewujudkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara;
6. Meminimalisir Potensi Konflik Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara;
7. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Memantapkan Kapasitas Kelembagaan Dan

Ketatalaksanaan.

3.2.2. Sasaran

1. Terlaksananya Hubungan Kerjasama Sinergis dan Harmonis Antara Suprastruktur Dengan Infrastruktur Politik;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada.
4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
5. Terwujudnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
6. Tersedianya Sistem Informasi Potensi Konflik dan Isu-Isu Strategis.
7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
8. Optimalisasi Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

3.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Provinsi Banten yaitu:

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Capaian Poin Demokrasi Kategori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi

		Angka Kriminalitas	Penurunan Angka Peristiwa Kriminalitas di Provinsi Banten (ideologiradikal,isuseparatisme,sumberdaya ekonomi)

3.4 Target Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan. Target indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Target Indikator Kinerja Utama 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, danefisien	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai
2.	Meningkatnya Stabilitas Daerah	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	80 Nilai
		Jumlah konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan HAM	100 Persen

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Banten.

Selanjutnya kebutuhan dana kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2024 ini, sebagaimana dapat di tuangkan dalam tabel berikut di bawah ini :

MATRIK RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**1.000.779.984.612,00**							**93.533.702.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**1.000.779.984.612,00**							**93.533.702.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (%)***				***100.000***	**24.453.412.920,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**21.525.302.806,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						651.508.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			678.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)				*100.000*								
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)* *Perencanaan Renja 2025 dan Renja Perubahan 2024 Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00* *2*	212.771.900,00 212.771.900,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintah*	*2.00*	222.308.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.130.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			5.900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*2.00*		
			Dokumen RKA 2025 (Dokumen)				*2*	6.130.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)*		*2.00*	*2.00*	*2.00*	6.130.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*2.00*	5.900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Perubahan RKA 2024 (Dokumen)				*2*	6.130.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						*3.000.000,00*	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD(Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*2.00*		
			Dokumen DPA 2025 (Dokumen)				*2*	3.000.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						3.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		900.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*2.00*		
			Dokumen Perubahan DPA 2024 (Dokumen)				*2*	*3.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						153.426.500,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		227.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*12.00*		
			Dokumen SAKIP, Laporan realisasi bulanan, tahunan dan semesteran Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Laporan)				*12*	153.426.500,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*	267.049.600,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*4.00*	214.292.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Dokumen LKIP, LPPD dan LKPJ Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Laporan)				*4*	267.049.600,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah (%)*				*100.000*	14.331.810.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			14.185.919.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)*		*39.00*	*39*	*39.00*	13.499.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*39.00*	13.706.729.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Badan				*39*	*13.499.000.000,00*	*(KP3B, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

			Kesbangpol Provinsi Banten (Orang / Bulan)													
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	*Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	672.810.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*12.00*	419.190.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jasa Administrasi Pelaksana ASN Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Dokumen)				*12*	672.810.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	16.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*12.00*	9.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			(Dokumen)												
			Pembinaan Penatausahaan dan Penguji an/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)				*12*	16.000.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*		
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	41.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*12.00*	14.925.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Penyusunan Laporan SPIP (Dokumen)				*12*	41.000.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*		
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						40.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			5.575.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*1.00*		
			Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)				*1*	40.000.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Aparatur Pemerintah*			
8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan							16.400.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*1.00*		
			Dokumen Evaluasi TLHP Semester 1 dan 2 Badan Kesbangpol				*1*	16.400.000,00	*(KP3B, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		*Aparatur Pemerintah*			

			TA.2023 (Dokumen)												
	8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)*		*0.00*	*18.00*	*18.00*	30.900.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*18.00*	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Laporan Keuangan/Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Laporan)				*18*	30.900.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

	8.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	*Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	15.700.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Dokumen)				*1*	15.700.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)*				*100.000*	3.071.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.375.769.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)* *Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Dokumen)*		*2.00* *2*	*2.00* *2*	*2.00* *2*	2.965.000.000 *2.965.000.000*	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintah*	*2.00*	976.214.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	30.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	379.555.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Badan Kesbangpol Provinsi Banten (Laporan)				*1*	*30.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	76.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tersedianya belanja Modal Alat Rumah Tangga (Laporan)				*1*	*76.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

	8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah (%)*				*100.000*	458.494.000,00	(Kota Serang, BANTEN), (Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, BANTEN), (KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			368.669.050,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	187.700.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	98.350.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Belanja Pakaian Dinas Badan Kesbangpol (Paket)				*1*	*187.700.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*		
	8.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						20.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*1.00*		
			Dokumen Administrasi Kepegawaian Kesbangpol Prov. Banten (Dokumen)				*1*	*20.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						80.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			85.104.050,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		*2.00*	*2.00*	*2.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*2.00*		
			Dokumen Penyusunan Laporan Website dan Dokumen PPID Badan Kesbangpol Prov.				*2*	*80.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

			Banten (Dokumen)												
	8.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)* *Peningkatan Kapasitas Aparatur (Dokumen)*		*12.00* 	*12.00* 	*12.00* *12*	50.000.000,00 *50.000.000,00*	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintah*	*12.00*	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)* *Dokumen Pelatihan Pegawai Badan Kesba*		*25.00* 	*25.00* 	*25.00* *25*	10.000.000,00 *10.000.000,00*	(Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintah*	*25.00*	10.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			ngpol Prov. Banten (Orang)													
	8.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*25.00*	*25.00*	*25.00*	28.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*25.00*	28.340.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Modal Alat Rumah Tangga (Orang)				*25*	*28.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)*		*25.00*	*25.00*	*25.00*	82.794.000,00	(Kota Serang, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*25.00*	76.875.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Dokumen Peningkatan Kompe				*25*	*82.794.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

			tensi Aparatur Badan Kesbangpol Prov. Banten (Orang)												
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum perangkat daerah (%)*				*100.000*	1.564.371.500,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			888.486.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			224.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) *Tersedianya barang cetakan Badan Kesbangpol Prov. Banten (Paket)*		*1.00*	*2.00*	*2.00* *2*	*200.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*	*2.00*		

	8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						236.603.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			111.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		*0.00*	*1.00*	*1.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*1.00*		
			Belanja bahan material Badan Kesbangpol Prov. Banten (Paket)				*1*	*236.603.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						25.020.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		*0.00*	*12.00*	*12.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*12.00*		
			Dokumen fasilitasi kunjungan tamu Badan Kesbangpol Prov. Banten (Lapor				*12*	*25.020.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

			an)												
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)* *Dokumen Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah Badan Kesbangpol Prov. Banten (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00* *12*	1.020.648.000,00 *1.020.648.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(Provinsi Banten dan Luar Provinsi Banten, Luar Wilayah)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*		Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintah*	*12.00*	475.686.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						32.000.500,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(Dokumen) *Terlaksananya Penata*		*0.00*	*1.00*	*1.00* *1*	 *32.000.500,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH*			*Aparatur Pemerintah*	*1.00*		

			usahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)						*(PAD)*						
	8.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	50.100.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	22.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Berita yang ditampilkan di halaman website selama 12 Bulan (Dokumen)				*1*	*50.100.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan*				*100.000*	2.975.420.420,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			2.569.068.356,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Pemerintahan Daerah (%)												
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						32.725.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			27.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) *Dokumen Surat Menyurat Tahun 2025 Badan Kesbangpol Prov. Banten (Laporan)*		*0.00*	*12.00*	*12.00* *12*	 *32.725.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)* *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*	*12.00*		
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)*		*12.00*	*12.00*	*12.00*	386.538.000,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*12.00*	331.001.456,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Penyediaan Listrik, Air dan Internet Tahun 2024 Badan Kesbangpol Prov. Banten (Laporan)				*12*	*386.538.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						300.000.000,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			304.490.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		*0.00*	*12.00*	*12.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*12.00*		
			Belanja Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Badan Kesbangpol Prov. Banten (Laporan)				*12*	*300.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.256.157.420,00	(KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.906.576.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*12.00*		
			Honorarium Pegawai Non PNS 13 Bulan, (Laporan)				*12*	*2.256.157.420,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)*				*100.000*	1.400.809.000,00	(Kota Serang, BANTEN), (Kota Serang, KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.459.391.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						836.229.000,00	(Kota Serang, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			834.514.400,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		*39.00*	*39.00*	*39.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*39.00*		
			Pemeliharaan Kendaraan 39 Unit Badan Kesbangpol Prov. Banten (Unit)				*39*	*836.229.000,00*	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	8.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						451.430.000,00	(Kota Serang, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			432.981.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)		*105.00*	*105.00*	*105.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*				*105.00*		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12 Bulan Badan Kesbangpol Prov. Banten (Unit)				*105*	*451.430.000,00*	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			

	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	113.150.000,00	(Kota Serang, KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	191.896.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pemeliharaan Gedung Kantor Badan Kesbangpol Prov. Banten (Unit)				*1*	*113.150.000,00*	*(Kota Serang, KP3B, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Persentase realisasi capaian pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) (%)***				***100.000***	**25.000.000.000,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**5.996.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						25.000.000.000	(Kab/Kota se-Provinsi Banten, BANTEN), (Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN), (Kota Serang, BANTEN), (KP3B, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			5.996.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan(%)				*100.000*								
	8.01.02.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	400.000.000,00	(Kab/Kota se-Provinsi Banten, BANTEN) *(Kab/Kota di Provinsi Banten, BANTEN)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan Kewarganegaraan di				*1*	*400.000.000,00*	*(Kab/Kota se-Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat dan Lembaga*			

			Kab./Kota se Prov. Banten (Dokumen)												
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)*		*9.00*	*9.00*	*9.00*	10.200.000.000,00	(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN) *(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*9.00*	2.851.073.855,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Peningkatan Kesadaran Bela Negara, Penyelenggaraan Kampung Wawasan Kebangsaan,				*9*	10.200.000.000,00	*(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, Mahasiswa dan Lembaga*		

				Rakor Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWKK), Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke 78 Tingkat Provinsi Banten, Lomba Cerdas Cermat Kebangsaan, Penyelenggaraan Hari Kesaktian Pancasila, Penyelenggaraan																		

			Hari Bela Negara (Dokumen)													
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						3.000.000.000,00	(KP3B, BANTEN)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)		*1.00*	*1.00*	*1.00*		*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*					*1.00*		
			Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lemba				*1*	3.000.000.000,00	*(KP3B, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga*			

			ga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Orang)												
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)*		*0.00*	*150.00*	*150.00*	300.000.000,00	(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN) *(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*150.00*	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Lomba Cerdas Cermat Antar Suku, Adat, Etnis, AntarGolongan Kab/Kota Se-Provinsi Banten (Orang)				*150*	*300.000.000,00*	*(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, Mahasiswa dan Lembaga*			
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)*		*0.00*	*3.00*	*3.00*	600.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN) *(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*3.00*	350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Simposium Kebangsaan, TOT Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Seminar Kebangsaan bagi Pelajar / Mahasiswa (Laporan)				*3*	*600.000.000,00*	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat,Mahasiswa dan Lembaga*			
	8.01.02.1.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						500.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Serang, BANTEN)*					*2.00*		
				Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Dalam Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, Pancasila				*2*	500.000.000,00	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, Mahasiswa, dan Lembaga*			

			Sebagai Dasar Negara dan Landasan Eksistensial yang Kokoh secara Filosofis, Yuridis, Sosiologis, sebagai kerangka dasar dalam kehidupan berneg ara (Dokumen)													
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*500*	1.500.000.000,00	(KP3B, BANTEN) (Kota Serang, BANTEN)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*500*	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Pengangkatan Purnapaskibra				*500*	*1.500.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar, Aparatur Pemerintahan, dan Masyarakat*			

			ka Duta Pancasila (Orang)												
	8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen)* *Laporan hasil Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan laporan hasil pembinaan purnapaskibraka (Dokumen)*		*0.00* *1*	*0.00*	*1.00*	1.000.000.000,00 *1.000.000.000,00*	(KP3B, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)* *(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Pelajar, Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan*	*1.00*	125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka						2.000.000.000,00	(KP3B, BANTEN)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen) *Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Dokumen)*		*0.00* *0.00*	*0.00* *0.00*	*1.00* *1*	*2.000.000.000,00*	*(Kota Serang, BANTEN)* *(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar, dan Aparatur Pemerintahan*	*1.00*		
8.01.02.1.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila		*Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)* *Laporan hasil pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)*		*0.00* *0.00*	*0.00* *0.00*	*1.00* *1*	2.000.000.000,00 *2.000.000.000,00*	(KP3B, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)* *(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat dan Pelajar*	*1.00*	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02.1.01.0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila							3.000.000.000,00	(KP3B, BANTEN)		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)		*0.00*	*0.00*	*1.00*		*(Kota Serang, BANTEN)*					*1.00*		
			Laporan hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen)				*1*	*3.000.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, dan Mahasiswa*			
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka		*Jumlah Paskibraka (Orang)*		*0.00*	*0.00*	*500*	500.000.000,00	(KP3B, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)*		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*500*	369.926.145,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Peserta Paskibraka Prov. Banten (Orang)				*500*	*500.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Pelajar*			

3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Nilai IDI pada poin hak-hak politik (Nilai)***				***67.780***	**846.922.360.533,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**39.448.449.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						846.922.360.533,00	(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN), (KP3B, KOTA SERANG)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			39.448.449.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Capaian Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala				*100.000*								

			Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (%)												
	8.01.03.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	300.000.000,00	(KP3B, KOTA SERANG) *(KOTA SERANG, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*2.00*	350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			FGD Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten, Modul Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Demokrasi (Dokumen)				*2*	300.000.000,00	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat, dan Lembaga*			
8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							2.855.784.400,00	(KP3B, KOTA SERANG)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Provinsi Banten, BANTEN)*					*2.00*		
			Tabulasi data Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Dokumen)				*2*	*2.855.784.400,00*	*(Provinsi Banten, KOTA SERANG)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintahan, Masyarakat , dan Lembaga*			
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							828.933.759.133,00	(KP3B, KOTA SERANG)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			37.538.449.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)		*12.00*	*12.00*	*12.00*		*(KOTA SERANG, BANTEN)*					*12.00*			
			Bantuan Keuangan Parpol dan Hibah Uang KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten (Orang)				*12*	828.933.759.133,00	*(KP3B, KOTA SERANG)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga*					

	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						12.832.817.000,00	(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			860.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah(Orang)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(KOTA SERANG, BANTEN)*					*150.00*		
			Penyelenggaraan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik di				*150*	*12.832.817.000,00*	*(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga*			

			Provinsi Banten, Rapat Koordinasi Pokja IDI, Lokakarya Peningkatan dan Penguatan Demokrasi di Provinsi Banten, Gerakan Membangun Masyarakat yang Cerdas Berpolitik (Orang)													
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan						2.000.000.000,00	(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)*		*4.00*	*4.00*	*4.00*		*(KOTA SERANG, BANTEN)*					*4.00*		

			Rapat Koordinasi Pemantauan, Pelaporan, dan Evalusi Perkembangan Politik di Daerah, Diseminasi Tata Cara Pengajuan, Pengelolaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik, Diseminasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Peningkatan Partisipasi				*4*	2.000.000.000,00	*(Kab/Kota Se-Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga*			

			Perempuan dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Penguatan Kenaikan Bantuan Keuam Parpol Bagi Kab/Kota di Provinsi Banten (Laporan)													
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase capaian pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)***				***100.000***	**1.842.182.200,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**835.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Capaian Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (%)*				*100.000*	1.842.182.200,00	(Kab/Kota di Provinsi Banten, BANTEN), (Kota Serang, BANTEN), (KP3B, KOTA SERANG)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			835.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.04.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						480.514.400,00	(KP3B, KOTA SERANG)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun(Dokumen)		*0.00*	*2.00*	*2.00*		*(Kota Serang, BANTEN)*					*2.00*		
			FGD Organisasi Kemasyarakatan di Provin				*2*	*480.514.400,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Ormas, OKP, Masyarakat dan Lembaga*			

			si Banten , Rapat Koordinasi Bidang Sosial di Provinsi Banten (Dokumen)												
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*2.00*	*2.00*	144.613.200,00	(Kota Serang, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*2.00*	110.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Implementasi PERPU, Peraturan Pemerintah dan Peraturan				*2*	*144.613.200,00*	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Ormas ,Masyarakat, OKP, dan Lembaga*			

			Menteri Terkait Organisasi Kemasyarakatan (Dokumen)												
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*		*0.00*	*100.00*	*100.00*	389.232.000,00	(Kota Serang, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*100.00*	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas di Provinsi Banten (Orang)				*100*	*389.232.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Masyarakat, Ormas, OKP dan Lembaga*			

	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)*		*100.00*	*100.00*	*100.00*	131.209.600,00	(Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*100.00*	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Rapat Koordinasi Pengawasan Ormas di Provinsi Banten (Orang)				*100*	*131.209.600,00*	*(Kota Serang, BANTEN)* (Provinsi Banten, BANTEN)	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah , Masyarakat, Ormas, OKP dan Lembaga*			
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						696.613.000,00	(Kab/Kota di Provinsi Banten, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			375.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)		0.00	6.00	6.00		(Kota Serang, BANTEN)					6.00		
			Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Pelatihan Bela Negara Bagi Ormas Dalam Rangka penguatan Ideologi kebangsaan dan wawasan kebangsaan, Pening				6	696.613.000,00	(Kab/Kota di Provinsi Banten, BANTEN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintah, Masyarakat, Ormas, OKP dan Lembaga			

			katan Kapasitas Pemuda Ormas di Provinsi Banten, Forum Silaturahmi Antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, OKP dan BEM dan Lembaga Nirlaba Lainnya di Provinsi Banten (Laporan)													
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**15.450.000.000,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**1.160.000.000,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
			Nilai IDI Pada poin kebebasan sipil (Nilai)				***88.620***									

	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Persentase Capaian Pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)*				*100.000*	15.450.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN), (KP3B, BANTEN), (KP3B, Kota Serang, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	400.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN) *(Provinsi Banten, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	125.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Forum Group Diskution (FGD)				*1*	*400.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur , Masyarakat, UMKM dan Lembaga*			

			Bidang Ketahanan Ekonomi di Prov Banten (Dokumen)												
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (Dokumen)*		*0.00*	*1.00*	*1.00*	2.000.000.000,00	*(Provinsi Banten, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	135.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan P4GN di Provinsi Banten (Doku				*1*	*2.000.000.000,00*	*(Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur , Masyarakat, UMKM dan Lembaga*			

			men)												
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	10.450.000.000,00	(KP3B, Kota Serang, BANTEN) *(Provinsi Banten, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdas				*1*	10.450.000.000,00	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga*			

			arkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri gubernur/bupati/wali Kota (Orang)													
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						400.000.000,00	(KP3B, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)		*150.00*	*150.00*	*150.00*		*(Provinsi Banten, BANTEN)*					*150.00*		
			RAPAT TIM PERPADU P4GN (Orang)				*150*	*400.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur, Masyarakat, UMKM dan Lembaga*			
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					2.200.000.000,00	(KP3B, Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat		*0.00*	*4.00*	*4.00*		*(Provinsi Banten, BANTEN)*					*4.00*		

			Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)												
			Diseminasi Wilayah Rawan Ketahanan Ekonomi di Kab/Kota se-Provinsi Banten (Laporan)				*4*	*2.200.000.000,00*	*(Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur, Masyarakat, UMKM dan Lembaga*			
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah (%)***				***100.000***	**87.112.028.959,00**				**Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan**			**24.568.950.194,00**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik						87.112.028.959,00	(Kota Serang, BANTEN), (KP3B, BANTEN), (KP3B, Kota Serang, BANTEN)			Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			24.568.950.194,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		Sosial	*Presentase Ketercapaian Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (%)*				*100.000*								
	8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						450.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			145.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta		*0.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kota Serang, BANTEN)*					*3.00*		

			Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun(Dokumen)												
			PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Dokumen)				*3*	*450.000.000,00*	*(Kab/Kota Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat*			
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						800.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)		*0.00*	*3.00*	*3.00*		*(Kota Serang, BANTEN)*					*3.00*		
			RAPAT TIM KEWASPADAAN DINI PROVINSI BANTEN, RAPAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Dokumen)				*3*	*800.000.000,00*	*(Kab/Kota Provinsi Banten, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat*			

	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)*		*8.00*	*8.00*	*8.00*	80.742.028.959,00	(KP3B, BANTEN) *(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*8.00*	20.450.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Hibah Uang kepada				*8*	80.742.028.959,00	*(KP3B, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Lembaga*			

			Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela danSosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.770.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			1.159.252.194,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)		150.00	150.00	150.00		(Kota Serang, BANTEN)					150.00		
			DIALOG KEWASPADAAN DINI, DETEKSI DINI KONFLIK SOSIAL DAN PENYAKIT MASYARAKAT, PEMBINAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH DI PROVI				150	1.770.000.000,00	(Kab/Kota Provinsi Banten, BANTEN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat			

			NSI BANTEN, PEMANTAUAN KELAPANGAN TERHADAP AKSI UNJUK RASA TINGKAT PROVINSI BANTEN(Orang)													
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.000.000.000,00	(Kota Serang, BANTEN)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			280.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)		3.00	3.00	3.00		(Kota Serang, BANTEN)					3.00		
			FASILITASI PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IJIN PENELITAN , IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 49 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN ORANG				3	1.000.000.000,00	(Provinsi Banten, BANTEN)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparatur Pemerintah, Lembaga dan Masyarakat				

			ASING DAN LEMBAGA MASYARAKAT ASING DI DAERAH (Laporan)												
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)*		*1.00*	*1.00*	*1.00*	2.350.000.000,00	(KP3B, Kota Serang, BANTEN) *(Kota Serang, BANTEN)*		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan		*1.00*	2.374.698.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi (Dokumen)				*1*	*2.350.000.000,00*	*(KP3B, Kota Serang, BANTEN)*	*PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)*			*Aparatur Pemerintah*			
	JUMLAH							**1.000.779.984.612,00**						93.533.702.000,00	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Banten 2023-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Banten serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2024.

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesbangpol Provinsi Banten Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Provinsi Banten maupun OPD yang membidangi fungsi lain.

Serang, Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

Sekretaris,

Epi Rustam, S.Kom, MM
NIP. 19690111 199603 1 003

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima – Serang

Telp. (0254) 267142 Fax (0254) 267143

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun 2024 mempunyai arti strategis dan hasil daripada musyawarah, koordinasi serta beberapa kali pengevaluasian demi pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif, terarah dan terkoordinasi.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 ini, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Banten, dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai dokumen Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraaan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Serang, Februari 2023

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten

Sekretaris,

Epi Rustam, S.Kom, MM
NIP. 19690111 199603 1 003

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU**	9
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
	2.4 Kinerja Pelayanan OPD	35
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**	37
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	37
	3.2 Tujuan dan Sasaran	37
	3.3 Indikator Kinerja Utama	38
	3.4 Target Indikator Kinerja Utama	39
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	40
BAB IV	**PENUTUP**	100